

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Problematika Tugas dan Kewenangan Pemerintah daerah dan pusat dalam Prespektif Negara kesatuan dan Otonomi Daerah” ini ditulis oleh Latifana Binti Khunaini, Nim 12103173096, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, tahun 2024. Dosen Pembimbing Bapak Muksin M.H.

Kata Kunci : Tugas, Kewenangan, Pemerintah pusat dan daerah, Negara kesatuan, Otonomi Daerah.

Tujuh puluh sembilan tahun Indonesia merdeka tetapi peraturan per undang-undangan selalu menjadi kan topik permasalahan yang setiap tahun diungkit-ungkit lagi dan lagi tannpa ada kejelasan, sejak kejatuhan preesien soeharto tahun1998 di indonesia sudah menerbitkan UU pemerintah daerah, pada tahun 1999, 2004 dan yang terakhir 2014 sampai sekarang. Didalam perubahan UU yang ke 3 masih saja menjadikan perundangu-undangan menjadi bedang kusust. Karena itu Tulisan ini menguraikan menuliskan perkembangan permasalahan anatar tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang belum mendapatkan kejelasan meskipun sudah di atur kewenangannya di dalam UU No 23 Tahun 2014,seharusnya hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menjlankan tugas dan kewenangan nya harus memilki hubungan baik, jangan sampai praktek dalam menjalankan kewajibannya menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan kekuasaan antara kedua satuan pemerintahan, sebab itu peneliti ingin mengkaji tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di lihat dari sisi Negara kesatuan dan Otonomi daerah.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti atau mengkaji dalam Rumusan masalah tersebut: 1, Bagaimana Tugas dan Kewenangan pemerintah pusat dan daerah menurut Prespektif UU no 23 Tahun 2014, 2. Bagai mana implementasi tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah prespektif negara kesatuan dan Otonomi

daerah. 3. Bagaimana problematika tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah menurut perspektif negara kesatuan dan otonomi daerah. Tujuan peneliti dalam penelitian ini agar kita bisa mengetahui tugas dan kewenangan pemerintah daerah dan pusat dalam UU No 23 Tahun 2014, mengetahui konsep tugas dan kewenangan pemerintah daerah dan pusat, dan mengetahui problem yang sesungguhnya yang dihadapi pemerintah daerah dan pusat dalam tugas dan kewenangannya.

Metode dalam penelitian ini atau penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Penelitian ini bersifat Normatif dimana data akan diperoleh dari membaca atau menganalisis bahan-bahan yang tertulis dan tidak harus bertatap muka dengan informan atau responden. Tetapi data yang diperoleh belum dapat diambil kesimpulan karena itu perlu dianalisis dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi menarik kesimpulan.

Setelah itu dari proses panjang, penelitian ini menghasilkan atau menyimpulkan 1. Tataan yang berkaitan dengan cara memberikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus pemerintahan daerah maupun pusat dalam UU no 23 tahun 2014 dengan sistem rumah tangga daerah, yang menggunakan sistem formal, meteril, dan riil atau praktis. Jadi pada dasarnya seluruh urusan pemerintahan sebenarnya berada pada pemerintahan pusat dan satuan kerja pemerintahan daerah hanyalah pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. 2. pengaturan dan tugas dan kewenangan yang diberikan pusat maupun daerah kerja samanya sangat kurang, pengaturan yang terjadi terdapat banyak pihak yang berkepentingan didalamnya dalam tugas dan kewenangan yang dijalankan tetap menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, yang memberikan atau membedakan urusan pemerintahan menjadi 3 urusan. Meskipun pemerintah tertinggi adalah pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah bisa mengambil keputusan untuk menjalankan atau mengatur urusan rumah tangganya sendiri, asal tidak melenceng dengan aturan pusat dan Pancasila. 3.

banyak permasalahan yang timbul dalam praktek nya dalam menjalankan Tugas dan kewenangan, pembagian urusan pemerintah dari urusan absolut, urusan konkuren, serta urusan tugas pembantu, banyak mengalami ketidak jeasan kewenangan dan tugas yang ada didalam pemerintahan, terutama didalam pemerintahan daerah, menurut asas otonomi daerah, daerah bisa membuat dan mengatur aturan anggaran rumah tangganya sendiri, tetapi disini banyak yang menyelewengkan tugas dan kewenangan dalam menjalankan kekuasaan.

ABSTRACT

The thesis with the title "Problematics of the Duties and Authorities of Regional and Central Governments in the Perspective of a Unitary State and Regional Autonomy" was written by Latifana Binti Khunaini, ID 12103173096, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayid Ali Rahmatullah State Islamic University, Tulungagung, 2024. Mentor Mr. Muksin M.H.

Keywords: Duties, Authority, Central and Regional Government, Unitary State, Regional Autonomy.

Seventy-nine years of Indonesia's independence but legal regulations have always been a problematic topic which is brought up again and again every year without any clarity, since the fall of the Soeharto presidency in 1998, Indonesia has issued regional government laws, in 1999, 2004 and so on. last 2014 until now. In the third amendment to the law, the legislation still becomes a complicated mess. Therefore, this article describes the development of problems between the duties and authorities of the central and regional governments which have not yet received clarity even though their authorities have been regulated in Law No. 23 of 2014. The relationship between the central and regional governments in carrying out their duties and authorities must have a good relationship. Don't let the practice of carrying out its obligations give rise to efforts to tug-of-war between the two government units, therefore the researcher wants to examine the duties and authority of the central and regional governments from the perspective of a unitary state and regional autonomy.

From this background, the researcher wants to research or examine the formulation of the problem: 1. What are the duties and authorities of the central and regional governments according to the perspective of Law No. 23 of 2014, 2. How are the implementation of the duties and authorities of the central and regional governments from the perspective of a unitary and autonomous state? area. 3. What are

the problematic duties and authorities of the central and regional governments from the perspective of a unitary state and regional autonomy? The researcher's aim in this research is so that we can understand the duties and authorities of regional and central governments in Law No. 23 of 2014, understand the concept of duties and authorities of regional and central governments, and find out the real problems faced by regional and central governments in their duties and authorities.

The method in this research is descriptive research, this research was carried out through library research. This research is normative in nature where data will be obtained from reading or analyzing written materials and does not require face to face contact with informants or respondents. However, the data obtained cannot be concluded yet because it needs to be analyzed by interpreting and examining the data as consideration for drawing conclusions.

After that, from a long process, this research produces or concludes 1. The order relating to how to provide authority, duties and responsibilities to regulate and manage regional and central government in Law no. 23 of 2014 with the regional household system, which uses a formal system, material, and real or practical. So basically all government affairs actually lie with the central government and regional government work units are only implementing central government policies. 2. There is very little cooperation between the regulations and duties and authority given by the center and regions, the arrangements that occur involve many parties having an interest in them. The duties and authorities carried out still use the principles of decentralization and deconcentration, which divide or distinguish government affairs into 3 affairs. Even though the highest government is the central government, regional governments can make decisions to run or regulate their own household affairs, as long as they do not deviate from central regulations and Pancasila. 3. many problems arise in practice in carrying out duties and authority, dividing government affairs from absolute affairs, concurrent affairs, and supporting tasks,

many experience unclear authority and duties within government, especially within regional government, according to the principle of regional autonomy, Regions can make and regulate their own bylaws, but here many people misuse their duties and authority in exercising their power.

ملخص

الأطروحة بعنوان "إشكاليات واجبات وسلطات الحكومات الإقليمية والمركزية في منظور الدولة الوجدوية والحكم الذاتي الإقليمي" كتبها لطيفة بنتي الخيني رقم التعريف 12103173096 قسم القانون الدستوري كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية، تولونج أجونج، 2024. المشرف السيد موكسين م.

الكلمات المفتاحية: الواجبات، السلطة، الحكومة المركزية والإقليمية، الدولة الوجدوية، الحكم الذاتي الإقليمي.

تسعة وسبعون عامًا من استقلال إندونيسيا، لكن اللوائح القانونية كانت دائمًا موضوعًا إشكاليًا يتم طرحه مرارًا وتكرارًا كل عام دون أي وضوح، منذ سقوط رئاسة سوهارتو في عام 1998، أصدرت إندونيسيا قوانين الحكومة الإقليمية، في عامي 1999 و2004. وهكذا عام 2014 الماضي وحتى الآن. وفي التعديل الثالث للقانون، لا يزال التشريع في حالة من الفوضى المعقدة. لذلك يصف هذا المقال تطور المشاكل بين واجبات وصلاحيات الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والتي لم تتضح بعد رغم أن صلاحياتها قد تم تنظيمها في القانون رقم 23 لسنة 2014. العلاقة بين الحكومات المركزية وحكومات الأقاليم في ويجب أن يكون القيام بواجباتهم وسلطاتهم على علاقة جيدة، ولا تدع ممارسة القيام بالتزاماتهم تثير جهود شد الحبل بين الوجدتين الحكوميتين، لذلك يريد الباحث دراسة واجبات وسلطاتهما. الحكومات المركزية والإقليمية من منظور الدولة الوجدوية والحكم الذاتي الإقليمي.

ومن هذا المنطلق يريد الباحث البحث أو دراسة صياغة المشكلة: 1. ما هي واجبات وصلاحيات الحكومتين المركزية والإقليمية من منظور القانون رقم 23 لسنة 2014، 2. كيف يتم تنفيذ واجبات وسلطات الحكومات المركزية والإقليمية من

منظور منطقة دولة موحدة وذات حكم ذاتي؟ 3. ما هي الواجبات والسلطات للحكومات المركزية والإقليمية من منظور الدولة الموحدة والحكم الذاتي الإقليمي؟ هدف الباحث في هذا البحث هو أن يتمكن من فهم واجبات وصلاحيات حكومات الإقليم والمركزية في القانون رقم 23 لسنة 2014، وفهم مفهوم واجبات وصلاحيات حكومات الإقليم والمركزية، ومعرفة المشاكل الحقيقية التي تواجهها الحكومات الإقليمية والمركزية في واجباتها وسلطاتها.

ومنهج هذا البحث هو البحث الوصفي، وقد تم هذا البحث من خلال البحث المكتبي. يعتبر هذا البحث معيارياً بطبيعته حيث سيتم الحصول على البيانات من قراءة أو تحليل المواد المكتوبة ولا يتطلب الاتصال وجهاً لوجه مع المخبرين أو المجيبين. ومع ذلك، لا يمكن الانتهاء من البيانات التي تم الحصول عليها بعد لأنها تحتاج إلى تحليل من خلال تفسير وفحص البيانات كأساس لاستخلاص النتائج.

بعد ذلك، ومن عملية طويلة، ينتج هذا البحث أو يخلص إلى 1. الأمر المتعلق بكيفية توفير السلطة والواجبات والمسؤوليات لتنظيم وإدارة الحكومة الإقليمية والمركزية في القانون رقم 23 لسنة 2014 بنظام الأسرة الإقليمية، والذي يستخدم نظام رسمي ومادي وحقيقي أو عملي. لذا فإن جميع الشؤون الحكومية تقع فعلياً على عاتق الحكومة المركزية، وتقوم وحدات العمل الحكومية الإقليمية بتنفيذ سياسات الحكومة المركزية فقط. هناك القليل جداً من التعاون بين اللوائح والواجبات والسلطات التي يمنحها المركز والأقاليم، والترتيبات التي تحدث تشمل العديد من الأطراف التي لها مصلحة فيها، ولا تزال الواجبات والسلطات المنفذة تستخدم مبادئ اللامركزية واللامركزية، التي تقسم أو تقسيم الشؤون الحكومية إلى 3 شؤون. على الرغم من أن أعلى حكومة هي الحكومة المركزية، إلا أن الحكومات الإقليمية يمكنها اتخاذ قرارات لإدارة أو تنظيم شؤونها المنزلية، طالما أنها لا تحيد عن اللوائح المركزية والبنكاسيلا. تنشأ العديد من المشاكل في الممارسة العملية في تنفيذ الواجبات والسلطة، وفصل

شؤون الحكومة عن الشؤون المطلقة، والشؤون المتزامنة، والمهام الداعمة، ويواجه الكثيرون سلطة وواجبات غير واضحة داخل الحكومة، وخاصة داخل الحكومة الإقليمية، وفقا لمبدأ الحكم الذاتي الإقليمي، يمكن للأقاليم أن يصنعون وينظمون لوائحهم الداخلية، ولكن هنا يسيئ الكثير من الناس استخدام واجباتهم وسلطتهم في ممارسة سلطتهم.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xvii
ملخص	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Penegasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan Sekripsi.....	20
BAB II LANDASAN TEORI DAN PUSTAKA	22
A. Deskripsi Teori	22
B. Fungsi Pemerintah.....	31
C. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.....	32
D. Asas-asas Pemerintah Daerah.....	36
E. Desentralisasi dan Dekonsentrasi.....	40
F. Penelitian Terdahulu.....	61